

## DAFTAR LAMPIRAN

---

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2013-2018
2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017
3. Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2017
4. Rencana Aksi atas Pencapaian kinerja Tahun 2017
5. Rencana Kinerja Tahunan 2017 dan 2018
6. Laporan hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP dari Inspektorat Prov.tahun sebelumnya

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, Pendidikan dan Jabatan .....	3
Tabel 1.2	Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Pertanahan.....	11
Tabel 2.1	Perencanaan Strategis, .....	15
Tabel 2.2.	Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran .....	15
Tabel 2.3.	Indikator Kinerja Utama IKU Tahun 2016-2021.....	16
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2017.....	18
Tabel 3.1.	Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja.....	19
Tabel 3.2.	Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.....	19
Tabel 3.3.	Target dan realisasi kinerja tahun 2017.....	20
Tabel 3.4.	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhi.....	21
Tabel 3.5.	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .....	22
Tabel 3.6.	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	25
Tabel 3.7.	Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja.....	26
Tabel 3.8.	Realisasi anggran perprogram dan kegiatan.....	27

## DAFTAR GAMBAR

---

Gamabr 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau.....	2
Gamabr 1.2. Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin.....	3
Gamabr 1.3. Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan.....	4
Gamabr 1.4. Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan.....	4
Gamabr 1.5. Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan.....	5

## KATA PENGANTAR

---

Puji syukur kami panjatkan atas ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan tugas dalam penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Pertanahan tahun 2017, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggung jawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi yang tepat waktu.

Lakip secara garis besarnya adalah Laporan yang berisi informasi pelaksanaan rencana kerja dan realisasi pencapaian pelaksanaan kerja Dinas Pertanahan selama satu tahun Anggaran, dimana tingkat keberhasilan suatu Dinas dapat diukur dari prosentasi realisasi anggaran yang mencapai target dari Sasaran Strategis yang dilaksanakan pada tahun anggaran tersebut. Adapun penjelasan secara rinci dari isi laporan dapat di baca pada buku LAKIP ini.

Demikian akhir penyusunan dan kami sangat menyadari bahwa penyusunan Lakip ini masih jauh dari kesempurnaan, namun kami berharap bahwa laporan ini dapat dijadikan tolok ukur terhadap peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Khususnya Dinas Pertanahan Kabupaten Berau sebagai wujud pertanggungjawaban dinas kepada Bupati Berau selaku Kepala Pemerintahan di Daerah.

## BAB I. PENDAHULUAN

### A. Dasar Pembentukan Organisasi

1. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2. Peraturan Bupati Berau No. 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau.

### B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Berau No. 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau, Dinas Pertanahan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas Dinas Pertanahan Kabupaten Berau

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pertanahan.

2. Fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau

Berdasarkan dari tugas tersebut di atas, fungsi yang dijalankan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Berau adalah:

- a. perumusan kebijakan di bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

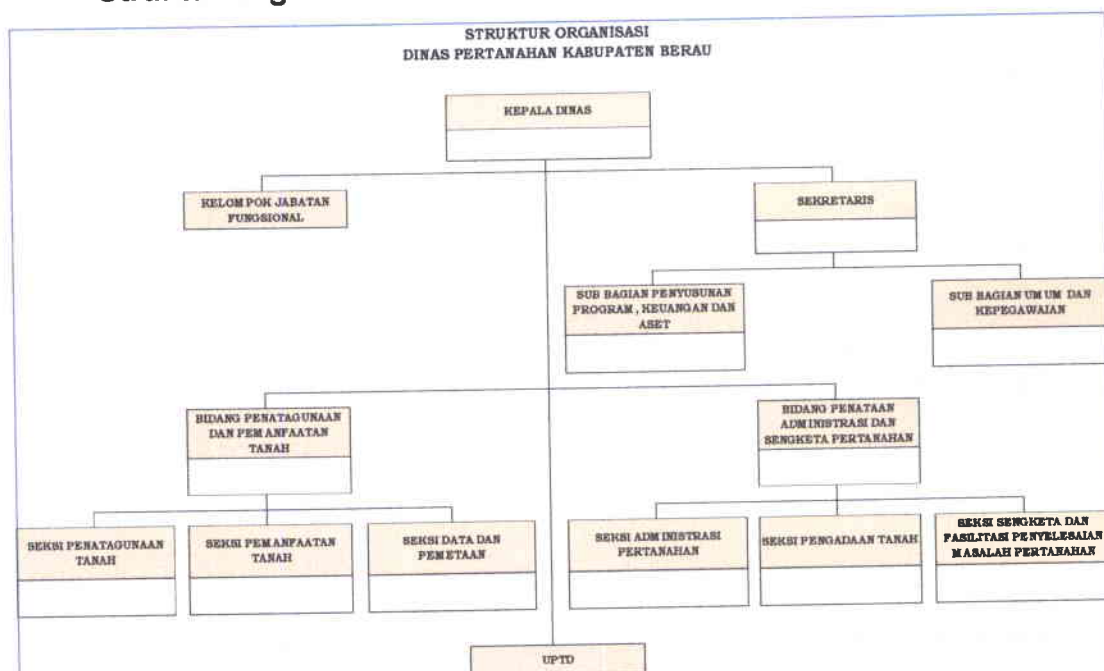
### C. Struktur Organisasi

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset;
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah, membawahkan:
  - 1) Seksi Penatagunaan Tanah;
  - 2) Seksi Pemanfaatan Tanah;
  - 3) Seksi Data dan Pemetaan Tanah.
- d. Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan, membawahkan:
  - 1) Seksi Administrasi Pertanahan;
  - 2) Seksi Pengadaan Tanah;
  - 3) Seksi Sengketa dan Fasilitas Penyelesaian Masalah Pertanahan.
- e. UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1

### Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau



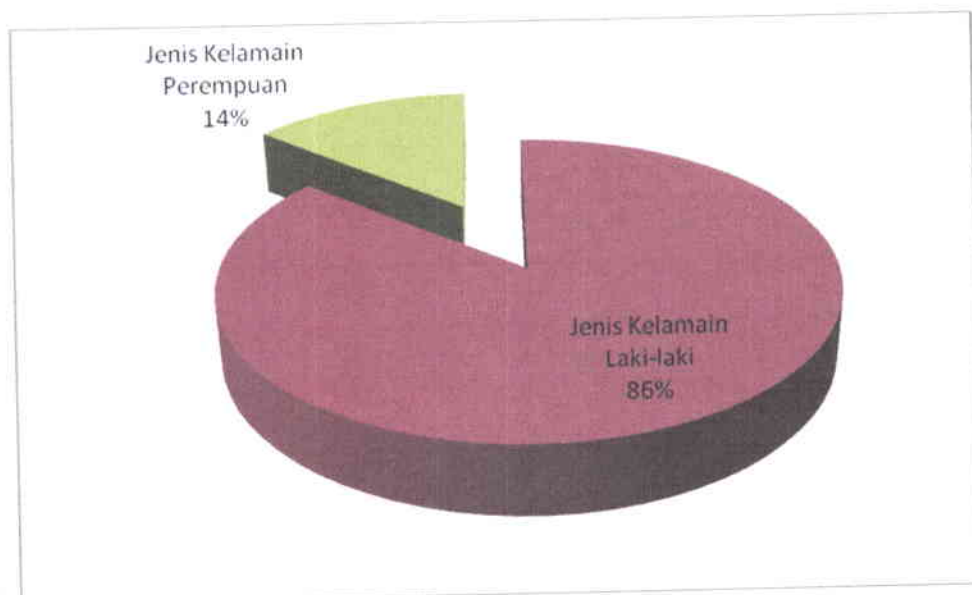
**D. Sumber Daya Aparatur**

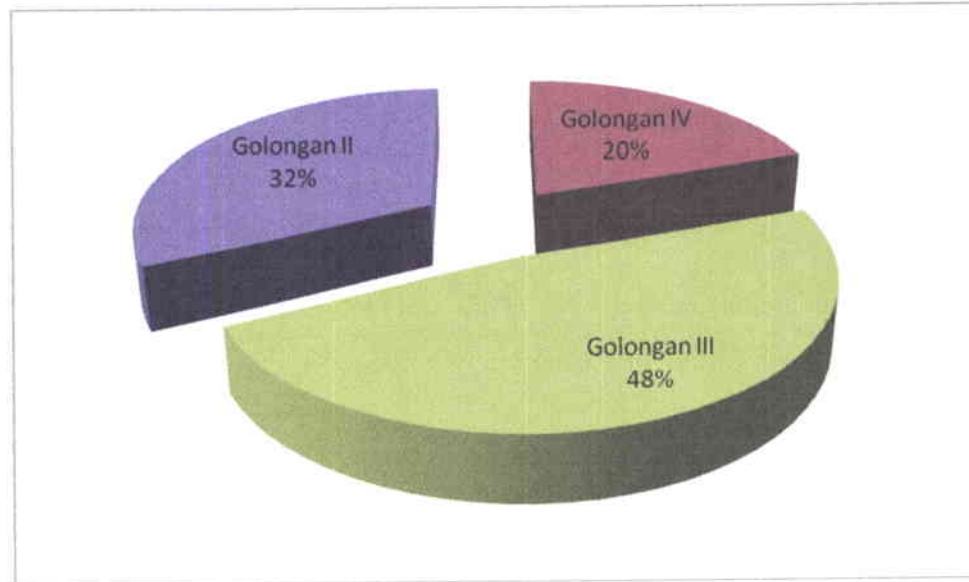
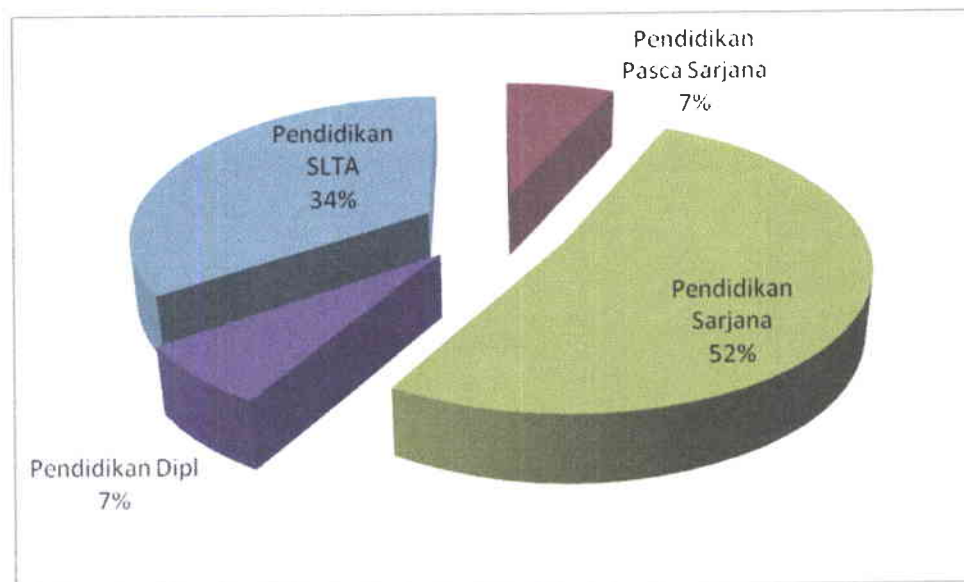
Pada sub bab ini disajikan penjelasan singkat sumber daya aparatur dan grafik jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, golongan, pendidikan serta jabatan.

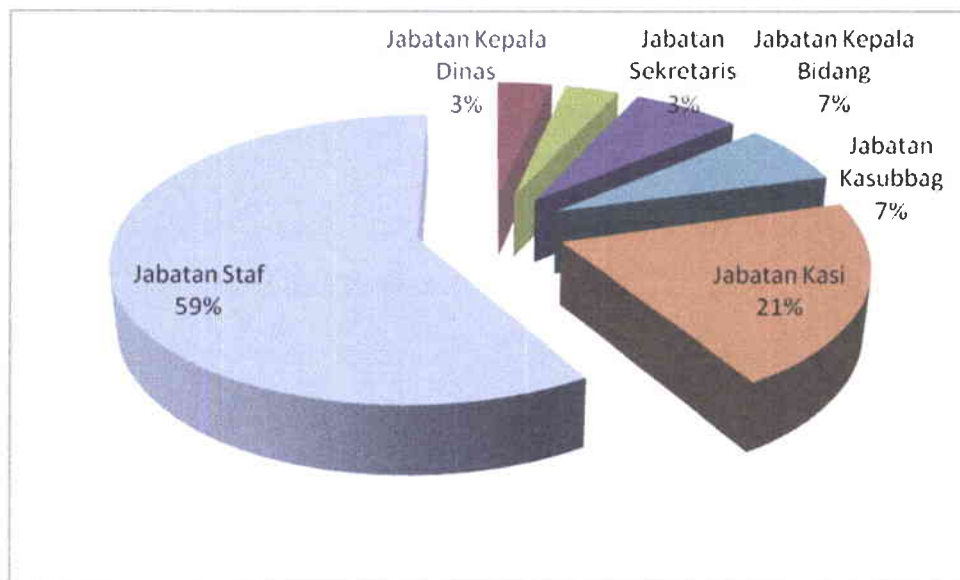
Tabel 1.1. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, Pendidikan dan Jabatan

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	1		1					1				
Sekretaris	1		1					1				
Jlh PNS	22	3	3	12	8		2	12	2	9		
Jlh Honor/PTT	3	1						3		1		
Jlh PNS + Honor/PTT	25	4	5	12	8		2	17	2	10		
Jumlah	25	4	5	12	8		2	17	2	10		

Gambar. 1.2. Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin



**Gambar. 1.3. Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan****Gambar. 1.4. Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan**

**Gambar. 1.5. Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan**

## E. Aspek Strategis Organisasi

Mengacu pada pernyataan visi dan misi pembangunan Kabupaten Berau, maka tujuan pembangunan pertanahan Kabupaten Berau yang hendak dicapai oleh Dinas pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

### 1.1. Meningkatnya pelayanan publik bidang pertanahan

Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Pertanahan Kabupaten Berau memiliki wewenang pelayanan publik bidang pertanahan lingkup daerah kab/kota meliputi Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota; Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten /kota; penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam Daerah kabupaten/kota; Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota; Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam

Daerah kabupaten/kota; Penerbitan izin membuka tanah; dan Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota. Dengan wewenang yang cukup luas, Dinas Pertanahan memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik bidang pertanahan agar masyarakat mendapatkan perlindungan terhadap hak atas tanah yang dimiliki serta menunjang kinerja bidang lain yang membutuhkan *support* di bidang pertanahan.

Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas pertanahan Kabupaten Berau dengan merujuk tujuan meningkatnya pelayanan publik bidang pertanahan selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang pertanahan, dengan indikator:
  - IKM
  - Luas tanah yang dimanfaatkan
  - Jumlah izin lokasi yang diberikan
- b. Menurunnya sengketa pertanahan, dengan indikator:
  - Jumlah konflik pertanahan

## **F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)**

### **1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanahan**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah (PD) merupakan salah satu bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi permasalahan yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan PD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Dengan melakukan identifikasi permasalahan secara tepat akan didapatkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD yakni kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Permasalahan pokok yang sedang dialami oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Berau adalah **"Masih rendahnya kualitas pelayanan publik bidang pertanahan"**. Pernyataan tersebut mengindikasikan kedudukan tanah yang penting tidak diimbangi dengan usaha untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam bidang pertanahan. Tanah merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. Fakta memperlihatkan bahwa keresahan di bidang pertanahan mendatangkan dampak negatif di bidang sosial, politik dan ekonomi.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Berau, antara lain:

#### 1. Rendahnya penatagunaan dan pemanfaatan tanah

Permasalahan pertanahan di Kabupaten Berau cukup kompleks. Dinas Pertanahan Kabupaten Berau merupakan salah satu bentuk pelayanan BPN RI tingkat daerah dimana saat ini, masih ditemukan pelaksanaan pelayanan dalam hal penatagunaan dan pemanfaatan tanah yang belum optimal dalam mewujudkan reformasi birokrasi pada Badan Pertanahan Nasional. Selain itu, persoalan pelayanan lainnya masih sering dijumpai dalam rendahnya penatagunaan dan pemanfaatan tanah di Kabupaten Berau karena Dinas Pertanahan merupakan Dinas yang baru dibentuk. Secara umum pelayanan di Dinas Pertanahan Kabupaten Berau masih belum optimal karena prosedur pengurusan tanah yang

lamban serta aparat pelayanan yang kurang berkompeten.

Kondisi fasilitas (sarana dan prasarana) di lingkungan layanan loket masih adasebagian yang kurang memadai. Belum adanya sistem antrian, belum menyediakan ruang tunggu yang nyaman bagi pengguna layanan. Tidak adanya kotak aduan yang disediakan untuk menampung segala keluhan pengguna layanan. Masyarakat belum bisa mengakses sepenuhnya informasi layanan. Keterbukaan informasi dan kejelasan informasi masih sulit didapat.

Permasalahan rendahnya penatagunaan dan pemanfaatan tanah disebabkan oleh akar masalah antara lain:

- a. Pensertifikatan lahan memakan biaya besar dan waktu lama
- b. klaim masyarakat terhadap tanah adat dan lahan perusahaan berdasarkan surat-surat garap
- c. Pemahaman OPD pengguna terhadap prosedur pengadaan tanah untuk pembangunan masih kurang
- d. Lahan pemda sebagian besar belum bersertifikat (500 bidang lebih)
- e. Koordinasi dengan BPN belum optimal
- f. Dokumen perizinan ada dibagian hukum yang tidak diserahkan
- g. Belum terpenuhinya kebutuhan lahan untuk pembangunan
- h. Penerbitan surat garap tidak tercatat dengan baik sehingga
- i. menimbulkan permasalahan tumpang tindih lahan
- j. Belum ada sistem informasi pemetaan tanah

## **2. Belum optimalnya penataan administrasi dan sengketa pertanahan**

Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan menyatakan bahwa sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai

hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut. Sengketa pertanahan salah satunya dipengaruhi oleh penataan administrasi pertanahan. Jika penataan administrasi pertanahan belum optimal tentu saja akan mempengaruhi jumlah sengketa pertanahan yang terjadi, misalnya pelayanan administrasi pertanahan memakan waktu yang sangat lama dan sengketa pertanahan yang tidak kunjung mendapat solusi penyelesaian (lambat).

Permasalahan belum optimalnya penataan administrasi dan sengketa pertanahan disebabkan oleh akar masalah sebagai berikut:

1. Masyarakat menganggap penyelesaian sengketa dari pemerintah lambat
2. Prosedur pelayanan dianggap lambat

### **3. Rendahnya kapasitas kelembagaan**

Salah satu kunci keberhasilan perencanaan Perangkat Daerah guna pencapaian tujuan dan sasaran sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan. Terbatasnya kompetensi sumber daya manusia di Dinas Pertanahan Kabupaten Berau untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pertanahan secara baik dan akuntabel menjadi salah satu permasalahan yang belum terselesaikan.

Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas pelayanan secara prosedural, namun untuk menghasilkan pelayanan prima,

Dinas Pertanahan masih harus berusaha mengembangkan kualitas pelayanan yang dapat melakukan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan terkait pertanahan Kabupaten Berau.

Perubahan dilakukan sebagai upaya penyempurnaan yang lebih merupakan kebutuhan daripada sekedar keinginan. Namun demikian, permasalahan kelembagaan pemerintah masih menghadang meski berbagai upaya perbaikan telah dilakukan.

Untuk itu, optimalisasi peran lembaga dalam mengantisipasi perubahan dan dinamika pembangunan daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Berau.

Dari masalah belum optimalnya kapasitas kelembagaan maka akar masalah adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya
2. Masih rendahnya sarana dan prasarana
3. Masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan

## 1.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan kajian aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas maka dapat disampaikan isu-isu strategis bidang pertanahan di Kabupaten Berau ditinjau dari gambaran pelayanan PD sebagai berikut:

- 1.2.1. Kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat dalam pemanfaatan tanah;
- 1.2.2. Tingginya alih fungsi pemanfaatan tanah;
- 1.2.3. Peran Masyarakat dalam membantu percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan;
- 1.2.4. Penyediaan Pelayanan Informasi Pertanahan; dan
- 1.2.5. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan.

## G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pertanahan Kabupaten Berau selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset yang terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan bidang pertanahan. Sarana dan prasarana merupakan bagian pendukung dalam kinerja PD untuk melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan yang saat ini Dinas Pertanahan Kabupaten Berau menempati lokasi di kompleks gedung pemerintah Kabupaten Berau di Jl. APT Pranoto Tanjung Redeb Berau. Gedung kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Berau masih menjadi satu dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung, dan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan rincian ruangan sebagai berikut :

- a. Ruang Kerja Kepala Dinas : 1 ruang
- b. Ruang Kerja Sekretaris : 1 Ruang
- c. Ruang Kerja Kasubag : 2 ruang
- d. Ruang Kerja Kabid : 2 ruang
- e. Ruang Kerja Kepala Seksi : 6 ruang
- f. Ruang Kerja Staf : 2 Ruang

Dari segi ruang kantor, untuk melaksanakan tugas bahwa sampai saat ini Dinas Pertanahan Kabupaten Berau masih kurang ideal, karena 2 Bidang masih tergabung menjadi satu dan sebagian ruang Kepala Seksi masih tergabung dengan staf.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, Dinas Pertanahan Kabupaten Berau sampai dengan saat ini masih kekurangan peralatan dan perlengkapan kantor penunjang kegiatan operasional. Adapun peralatan dan perlengkapan kantor yang ada sebagai berikut:

Tabel 1.2 Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Pertanahan.

No	Jenis	Satuan	Ket	Satuan	Ket
1	Komputer	9 Unit	Kondisi Baik		
2	Printer	9 Unit	Kondisi Baik	8 Unit	Kondisi Rusak
3	Notebook	2 Unit	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
4	Plotter		Kondisi Baik	2 Unit	Kondisi Rusak

5	Mesin Ketik	1 Unit	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
6	GPS	2 Buah	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
7	UPS	1 Buah	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
8	Kompas Geologi	1 Unit	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
9	Dispenser	3 Unit	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
10	Sepatu Safety	5 Pasang	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
11	TV Monitor	2 Unit	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
12	Lemari Es	2 Unit	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
13	Palu	3 Buah	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
14	Brand Kas	1 Buah	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
15	Kaca Mata Safety	4 Buah	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
16	Proyektor + Attachment	1 Unit	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
17	Filling Besi	2 Unit	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
18	Helmet	5 Buah	Kondisi Baik		Kondisi Rusak

19	Layar Film	1 Unit	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
20	Pendingin Ruangan	10 Unit	Kondisi Baik	1 Unit	Kondisi Rusak
21	Lemari Arsip	16 Unit	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
22	Kipas Angin	1 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
23	Telpon Cabel	5 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
24	Meja Kerja Staf (4)	6 Set	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
25	Meja Kerja Staf (2)	4 Set	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
25	Meja Kerja Staf	13 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
26	Kursi Meja Mebel Tamu	3 Set	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
27	Kursi Kerja Mebel	58 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
28	Lemari Buppet	3 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
29	Lampu filling (2)	22 Set	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
30	Tabung APK	1 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
31	Mesin Potocopy	1 Unit	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak

32	Kendaraan Dinas Perorangan roda 4	2 Unit	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
33	Kendaraan Dinas Operasional roda 2	2 Unit	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak

## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

Tabel 2.1. Perencanaan Strategis

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Th. 2016	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkannya pelayanan public bidang pertanahan (IKM)	IKM	Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang pertanahan	IKM	%		62,5 1	65,7 5	67,2 5	70,5 0	72,25
	Luas tanah yang dimanfaatkan		Luas tanah yang dimanfaatkan	Bidang		7 Bida ng	8 Bida ng	10 Bida ng	12 Bida ng	14 Bida ng
	Jumlah izin lokasi yang diberikan		Jumlah izin lokasi yang diberikan	Ijin		25 Ijin	25 Ijin	30 Ijin	30 Ijin	30 Ijin
	Jumlah konflik pertanahan	Menurunnya sengketa pertanahan	Jumlah konflik pertanahan	Sengketa		2 Seng keta	2 Seng keta	2 Seng keta	3 Seng keta	3 Seng keta

Tabel 2.2. Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya pelayanan public bidang pertanahan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang	Luas tanah yang dimanfaatkan	Bidang	<b>Program Penataan penguasaan pemilkn,</b>	Penataan penguasaan , pemilkn, penggunaan

	(IKM)	pertanahan		Lokasi	penggunaan dan pemanfaatan tanah	dan pemanfaatan tanah
						Pemanfaatan tanah
			Jumlah izin lokasi yang diberikan	Ijin		Penatagunaan tanah
			Menurunnya sengketa pertanahan	Jumlah konflik pertanahan		Sengketa
2		Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang pertanahan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang pertanahan	Orang/ Unit	<b>Program pengembangan sistem informasi pertanahan</b>	Peningkatan kapasitas sumber daya pemetaan tanah

## B. Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama IKU Tahun 2016-2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan	Presentase pengadaan tanah	Untuk mengetahui tersedianya kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan	$\frac{\text{Jumlah lokasi tanah yang dibeli tahun}(i)}{\text{Jumlah lokasi yang dibutuhkan tahun } (i)} \times 100\%$	Surat permohonan pengadaan tanah dari SKPD	Kabid. Penataan Administrasi dan Sengketa Tanah

2	Fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah	Presentase sengketa tanah yang terfasilitasi	Upaya penyelesaian sengketa tanah	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah yang ditangani tahun(i)}}{\text{Jumlah kasus tanah sengketa yang dilaporkan tahun (i)}} \times 100\%$	Data dari surat pengaduan masyarakat desa dan instansi terkait	Kabid. Penataan Administrasi dan Sengketa Tanah
3	Menyiapkan bahan untuk penerbitan ijin lokasi	Presentasi penerbitan ijin lokasi terhadap kawasan yang sesuai peruntukannya dalam RTRWK Berau	Untuk memenuhi permohonan ijin lokasi	$\frac{\text{Luas ijin lokasi}}{\text{Luas peruntukan dalam RTRWK}} \times 100\%$	Surat permohonan ijin lokasi RTRWK Berau	Kabid. Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah
4	Sertifikasi tanah Negara dan Masyarakat	Presentasi sertifikasi terhadap luas lahan Non Kehutanan	Agar tanah Negara dapat tersertifikatkan	$\frac{\text{Luas HGU/HGB/HM}}{\text{Luas lahan Non Kehutanan}} \times 100\%$	Ijin lokasi, Surat garapan	Kabid. Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah

**C. Perjanjian Kinerja**

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	Org	5
	Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	Buku	3
	Tersedianya lahan di Kabupaten Berau	Lahan yang dibebaskan	%	100
	Terinventarisasinya Aset Tanah di Kabupaten Beau pertanahan	Pemasangan patok lahan dan plang nama	%	100

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

##### 1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja

Tabel 3.1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2015	Nilai 2016
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30%		
2	Pengukuran Kinerja	25%		
3	Pelaporan Kinerja	15%		
4	Evaluasi Kinerja	10%		
5	Capaian Kinerja	20%		
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	100%		
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			

##### 2. Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

#### B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulanan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang pertanahan	Penataan penguasaan , pemilkn, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Bidang	9	Triwulan I s/d Triwulan IV	9	6	66,67

2		Pemanfaatan tanah	Lokasi	8	Triwulan I s/d Triwulan IV	8	8	100
3		Penatagunaan tanah	Ijin	25	Triwulan I s/d Triwulan IV	25	25	100
4	Menurunnya sengketa pertanahan	Inventarisasi tanah-tanah Pemerintah Kabupaten Berau & fasilitasi permasalahan pertanahan	Sengketa	2	Triwulan I s/d Triwulan IV	2	0	0
5	Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang pertanahan	Peningkatan kapasitas sumber daya pemetaan tanah	Orang/ Unit	2	Triwulan I s/d Triwulan IV	2	2	100

### C. Analisis Capaian Kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.3. Target dan realisasi kinerja tahun 2017

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Penataan penguasaan , pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Bidang	9	6	66,67
2	Pemanfaatan tanah	Lokasi	8	8	100
3	Penatagunaan tanah	Ijin	25	25	100
4	Inventarisasi tanah-tanah Pemerintah Kabupaten Berau & fasilitasi permasalahan pertanahan	Sengketa	2	0	0

5	Peningkatan kapasitas sumber daya pemetaan tanah	Org/Unit	2	2	100
---	--	----------	---	---	-----

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.4. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan Tahun 2017
			2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7 (6-5/5*100%)
1	Penataan penguasaan , pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Bidang	0	0	6	
2	Pemanfaatan tanah	Lokasi	0	0	8	
3	Penatagunaan tanah	Ijin	0	0	25	
4	Inventarisasi tanah-tanah Pemerintah Kabupaten Berau & fasilitasi permasalahan pertanahan	Sengketa	0	0	0	
5	Peningkatan kapasitas sumber daya pemetaan tanah	Org/Unit	0	0	2	

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;



Tabel 3.5. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Penataan penguasaan , pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Bidang	9	6	66,67 %
2	Pemanfaatan tanah	Lokasi	8	8	100 %
3	Penatagunaan tanah	Ijin	25	25	100 %
4	Inventarisasi tanah-tanah Pemerintah Kabupaten Berau & fasilitasi permasalahan pertanahan	Sengketa	2	0	0 %
5	Peningkatan kapasitas sumber daya pemetaan tanah	Org/Unit	2	2	100 %

Target Akhir RPJMD : untuk Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Renstra : untuk Laporan Kinerja Perangkat Daerah



4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
  - Adapun Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Dinas Pertanahan Kabupaten Berau belua ada
  
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
  - yang belum bisa mencapai target disebabkan kendala teknis dan non teknis, terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak mencapai target, yaitu Kegiatan Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah terealisasi 46,85 % , kegiatan tersebut tetap dilaksanakan dengan cara peninjauan lapangan tetap dilaksanakan ke Kecamatan Sambaliung. Kendalanya lahan maunya dipindahkan ke Kampung Tanjung Batu sedangkan dalam aturan harus melalui perubahan dan perlu penggarisan Bapak Bupati Berau, dan ke Kecamatan Maratua. Kendalanya negosiasi tidak terjadi kesepakatan karena pemilik meminta harga terlalu tinggi diatas nilai appraisal
  - Yang menjadi permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan DPPA OPD Tahun 2017 adalah pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan untuk kepentingan umum adalah
    1. Tidak tercapainya kesepakatan mengenai harga antara pemilik lahan dengan pemerintah daerah ini disebabkan karena adanya harga nilai jual tanah yang tidak sama yaitu pemerintah berpijak pada NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yang selalu dibawah harga pasar sedangkan pemilik lahan sering menuntut harga tiga atau empat kali lebih besar dari NJOP untuk ganti rugi.
    2. Lahan yang sudah ada maunya dipindahkan sedangkan dalam aturan harus melalui perubahan dan perlu penggarisan Bapak Bupati Berau
  - Yang menjadi solusi dan inovasi yang akan/sudah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan DPPA OPD Tahun 2017 adalah



1. Meningkatkan keberpihakan dan penghormatan terhadap pemilik hak atas tanah dengan melakukan sosialisasi, negosiasi dan pemberian kompensasi yang lebih komprehensif. Tanah yang dibebaskan akan ditangani oleh tim penilai independen melalui sebuah kriteria yang transparan, kredibel dan akuntabel.
  2. Terhadap lahan-lahan yang tidak dapat terealisasi pada tahun 2017 dan lahan tersebut memang dibutuhkan oleh SKPD pengguna mohon dapat dianggarkan kembali pengadaannya pada anggaran tahun 2018.
- Lahan-lahan yang dimohonkan untuk pengadaannya dan tanah belum disertifikatkan hendaknya dilakukan persertifikatan terlebih dahulu guna menghindari tumpang tindih dikemudian hari
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan.
- **PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH**
    - a. Kegiatan Penataan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah realisasi Fisik kegiatan 66,67 % dari target 9 bidang tanah yang dibebaskan, yang terrealisasi hanya 6 bidang tanah yang dibebaskan dan realisasi keuangan 46,85 % dari anggaran Rp. 5.104.308.753 dan terealisasi sebesar Rp. 2.391.354.500 realisasi fisik dan keuangan tidak mencapai 100% disebabkan tidak adanya kesepakatan harga antara pemilik lahan dan pemerintah daerah. Tidak tercapainya kesepakatan mengenai harga antara pemilik lahan dengan pemerintah daerah ini disebabkan karena adanya harga nilai jual tanah yang tidak sama yaitu pemerintah berpijak pada NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yang selalu dibawah harga pasar sedangkan pemilik lahan sering menuntut harga tiga atau empat kali lebih besar dari NJOP untuk ganti rugi dan Lahan yang sudah ada maunya dipindahkan sedangkan dalam aturan harus melalui perubahan dan perlu penggarisan Bapak Bupati Berau

sehingga target yang di harapkan tidak tercapai, hal ini akan menjadi perhatian bagi bidang Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan untuk dapat mengevaluasi kembali kegiatan tersebut sehingga untuk tahun mendatang harus dapat lebih di tingkatkan.

- b. Kegiatan Inventarisasi tanah-tanah pamarintah kabupaten berau dan fasilitasi permasalahan pertanahan realisasi Fisik kegiatan 0 % dari target 2 sengketa yang difasilitasi, tidak dapat terselesaikan dan realisasi keuangan 96,50 % dari anggaran Rp. 375.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 361.883.250 sehingga target yang di harapkan tidak tercapai, hal ini akan menjadi perhatian bagi bidang Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan untuk dapat mengevaluasi kembali kegiatan tersebut sehingga untuk tahun mendatang harus dapat lebih di tingkatkan.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Tanah realisasi Fisik kegiatan 100 % dari target 8 Lokasi dan realisasi keuangan 99,92 % dari anggaran Rp. 248.852.000 dan terealisasi sebesar Rp. 248.644.000, realisasi keuangan tidak mencapai 100%. Adapun dana yang tidak terserab atau di gunakan di kembalikan pad akas daerah.

➤ **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN**

- a. Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya pemetaan tanah Realisasi Fisik kegiatan 100 % dan realisasi keuangan 99,46 % dari anggaran Rp. 175.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 174.053.800 untuk honorarium, belanja alat tulis kantor, belanja bimbingan teknis, Belanja kontribusi dan kepesertaan , belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan peralatan alat kantor lainnya, belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan peralatan personal computer dan belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan peralatan pemetaan ukur. Adapun dana yang tidak terserab atau di gunakan di kembalikan pad akas daerah.

## 7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang pertanahan	Penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	66,67 %	46,85	19,82
		Pemanfaatan tanah	100 %	99,92	0,08
		Penatagunaan tanah	100 %	97,75	2,25
2	Menurunnya sengketa pertanahan	Inventarisasi tanah-tanah Pemerintah Kabupaten Berau & fasilitasi permasalahan pertanahan	0 %	96,50	96,50
3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang pertanahan	Peningkatan kapasitas sumber daya pemetaan tanah	100 %	99,46	0,54

## D. Capaian Kinerja Lainnya (bila ada)

Adapun capaian kinerja lainnya Dinas Pertanahan Kabupaten Berau belua ada



**E. Realisasi Anggaran**

## 1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Tabel 3.7. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	5 Org	5 Org	100	70.000.000	63.814.680	91,16
2	Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja	3	3	100	50.000.000	48.328.000	96,66
3	Tersedianya lahan di Kabupaten Berau	100 %	6 dari 9 Target	66,67	5.104.308.753	2.391.354.500	46,85
4	Terinventarisasinya Aset Tanah di Kabupaten Beau pertanahan	100 %	35 dari 200 ptk	17,50	375.000.000	361.883.250	96,50

## 3. Realisasi anggaran per program dan Kegiatan

Tabel 3.8. Realisasi anggran perprogram dan kegiatan

No	Program/kegiatan	Anggaran			Ket
		Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.031.772.000</b>	<b>855.347.274</b>	<b>82,90</b>	
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	1.500.000	1.498.500	99,90	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik	95.000.000	72.739.969	76,57	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/Operasional	170.000.000	65.731.850	38,67	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	125.272.000	102.826.000	82,08	

5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.000.000	9.782.000	97,82
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20.000.000	18.175.000	90,88
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.000.000	24.984.000	99,94
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	19.668.800	98,34
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	0	0
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	151.000.000	148.445.000	98,31
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000	10.560.000	88,00
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	44.000.000	43.678.000	99,27
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	195.000.000	193.060.155	99,91
14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	100.000.000	81.870.000	81,87
15	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	63.000.000	62.328.000	98,93
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>24.000.000</b>	<b>23.550.000</b>	<b>98,13</b>
16	Pengadaan Mebeleur	24.000.000	23.550.000	98,13
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	0	0
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>36.000.000</b>	<b>32.400.000</b>	<b>90,00</b>
18	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	36.000.000	32.400.000	90,00
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>70.000.00</b>	<b>63.814.680</b>	<b>91,16</b>
18	Bimtek dan Implementasi Pertauran Perundang- Undangan	70.000.000	63.814.680	91,16
<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>50.000.000</b>	<b>48.328.000</b>	<b>96,66</b>
20	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	50.000.000	48.328.000	96,66

<b>VII</b>	<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	<b>6.128.160.753</b>	<b>3.392.879.481</b>	<b>55,37</b>	
21	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	5.104.308.753	2.391.354.500	46,85	
22	Inventarisasi Tanah-tanah Pemerintah Kabupaten Berau dan Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	375.000.000	361.883.250	96,50	
23	Pemanfaatan Tanah	248.852.000	248.644.000	99,92	
24	Penatagunaan Tanah	400.000.000	390.997.731	97,75	
<b>VIII</b>	<b>Program Pengembangan Sistim Informasi Pertanahan</b>	<b>175.000.000</b>	<b>174.053.800</b>	<b>99,46</b>	
25	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pertanahan	175.000.000	174.053.800	99,46	



#### BAB. IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2017 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2017. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Kegiatan maka pencapaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dan lampiran.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan Kabupaten Berau dimana penyusunan Laporan Akuntabilitas belum sepenuhnya di dasarkan atas dokumen Perencanaan Strategik di karenakan usulan-usulan program kegiatan Dinas Pertanahan Kabupaten Berau yang diusulkan masih sebagian terdiri dari Bagian Pertanahan setda pada tahun 2016 sehingga penyusunan Lakip hanya berdasarkan pada Program-program kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA- SKPD) saja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini di harapkan dapat memacu pelaksanaan good governance yang melibatkan stake holders, sehingga kedepan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang di harapkan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berkat kerja sama Tim Perumus dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, akhirnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat disusun sesuai dengan waktu, jadwal yang telah ditetapkan dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai bentuk dari tanggung jawab dan transparansi terhadap masyarakat.

Tanjung Redeb, Januari 2018  
Kepala Dinas



**SUPRIANTO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620827 199103 1 011



**LAMPIRAN**

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2016-2020/21
2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 secara berjenjang
3. Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2018
4. Rencana Aksi atas Pencapaian kinerja Tahun 2017
5. Rencana Kinerja Tahunan 2018

